



**KEBIJAKAN DEVALUASI NILAI MATA UANG RUPIAH
12 SEPTEMBER 1986: PENGARUHNYA TERHADAP NERACA
PERDAGANGAN LUAR NEGERI TAHUN 1987-1991**

Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Sejarah**

Disusun Oleh:

**Inany Nur Azizah
NIM 13030115120025**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya, Inany Nur Azizah, menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), maupun Strata Tiga (S3) pada Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi yang lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi sebagai penulis.

Semarang, 17 Oktober 2019

Penulis,

Inany Nur Azizah.

NIM 13030115120015

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

-QS Alam Nasyroh:5-

“Tubuh dibersihkan dengan air, jiwa dibersihkan dengan air mata, akal dibersihkan dengan pengetahuan, dan jiwa dibersihkan dengan cinta.”

-Sayyidina Ali bi Abi
Tholib -

Dipersembahkan untuk:

Bapak, Mamah, adik, dan

Departemen Sejarah

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing,

Dr. Haryono Rinardi, M.Hum.

NIP. 196703111993031004

Skripsi dengan judul “Kebijakan Devaluasi Nilai Mata Uang Rupiah 12 September 1986: Pengaruhnya terhadap Neraca Perdagangan Luar Negeri Tahun 1987-1991” yang disusun oleh Inany Nur Azizah (NIM 13030115120025) telah diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi Program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada hari, 17 Oktober 2019.

Ketua,

Anggota I,

Prof. Dr. Sutejo K. Widodo, M.Si.

Dr. Haryono Rinardi, M.Hum.

NIP. 196005151985031004

NIP.196703111993031004

Anggota II,

Anggota III,

Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M.Hum.

Dra. Sri Indrahti, M.Hum.

NIP. 196406261989031003

NIP. 196602151991032001

Mengesahkan,

Dekan

Dr. Nurhayati, M.Hum.
NIP 196610041990012001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Kebijakan Devaluasi Nilai Mata Uang Rupiah 12 September 1986: Pengaruhnya terhadap Neraca Perdagangan Luar Negeri Tahun 1987-1991”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan utama guna memperoleh gelar sarjana Program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan, bimbingan, petunjuk, keluasan wawasan dan motivasi kepada Dr. Haryono Rinardi, M.Hum, selaku dosen pembimbing. Dengan segala kemampuan, pengetahuan, pemikiran yang hebat, kesabaran serta waktu yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk inspirasinya.

Di dalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, penulis juga memberikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Dr. Nurhayati, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Undip, Dr. Dhanang Respati Puguh, M.Hum. selaku Ketua Departemen Sejarah dan Dr. Haryono Rinardi, M.Hum. selaku Sekretaris Departemen Sejarah yang telah memberikan izin dan kemudahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih juga kepada Dra. Titik Suliyati, M.T selaku dosen wali yang dengan sabar telah memberikan perhatian terhadap perkembangan akademik penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada segenap dosen-dosen di Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang telah berkenan memberikan pelajaran intelektual, inspirasi serta pengalaman yang sangat berharga dalam membentuk dan mengembangkan kepribadian penulis selama menjadi mahasiswa di Departemen ini. Terima kasih

juga penulis sampaikan kepada segenap dosen penguji. Prof. Dr. Sutejo K. Widodo, M.Si, Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M. Hum., dan Dra. Sri Indrahti, M.Hum. yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun bagi skripsi ini.

Ucapan terima kasih tidak lupa penulis sampaikan kepada pihak-pihak dari Bank Indonesia, Kompas Semarang, Perpustakaan Departemen Sejarah Undip, dan Perpustakaan Undip, untuk pelayanan dari para petugas yang luar biasa ramah sehingga penulis bisa mendapatkan sumber primer maupun sekunder yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi ini.

Tidak lupa penulis senantiasa mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Mamah dan bapak tersayang Ibu Nur Hayari dan Bapak Maryono yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis secara moril maupun materil hingga skripsi ini dapat selesai. Terima kasih untuk kakak dan adik tercinta, yaitu kakak Imam Mustolah, adik Shulasi Nur Haliza dan adik Adzkia Aswan Nur Azizah yang senantiasa memberikan doa dan motivasi. Terima kasih juga kepada teman-teman rumah, yaitu Rindi Fitriani, Towaf Hidayat, Faizal Abdau, dan Andika Parahita Putra yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih pula untuk Wina, Diyah, Tatik, Dwi, Niken, Deni, Syukron, dan rekan seperjuangan Sejarah 2015 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan waktu, dukungan dan bantuan sehingga skripsi ini bisa selesai. Secara khusus penulis sampaikan permintaan maaf dan terima kasih kepada, Shely sebagai teman satu kost yang sangat berjasa selalu bersama-sama selama empat tahun di Semarang, serta terima kasih pada Yusinta, Rahma, Riska Arliza, Aini, Vega, dan Zeli untuk 5 tahun yang penuh kenangan dan makna. Terima kasih juga kepada rekan angkatan 2014 yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi dalam mengerjakan skripsi dan meminjamkan buku-buku yang relevan dengan skripsi ini. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentu tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan akademik dan pembelajaran serta ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang

Semarang, 17 Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN <i>MOTTO</i> DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGES	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR ISTILAH	xii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GRAFIK	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
<i>ABSTRACT</i>	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II GAMBARAN EKONOMI INDONESIA	20
MENJELANG TAHUN 1986	
A. Keadaan Ekonomi Indonesia Sebelum Dasawarsa 1986	20
B. Kondisi Neraca Pembayaran Indonesia Kaitanya dengan Ekspor dan Impor	28
C. Neraca Perdagangan Luar Negeri Indonesia	33
1. Ekspor	36

	2. Impor	38
	D. Sumber Devisa Pemerintah Indonesia Sebelum Tahun 1986	41
BAB III	DEVALUASI NILAI MATA	47
	UANG RUPIAH 12 SEPTEMBER 1986	
	A. Tujuan Kebijakan Devaluasi Nilai Mata Uang Rupiah 12 September 1986	47
	B. Kebijakan Devaluasi Nilai Mata Uang Rupiah 12 September 1986	48
	C. Paket Lanjutan Kebijakan Devaluasi Nilai Mata Uang Rupiah 12 September 1986 yang Berkaitan dengan Upaya Pemerintah Mendorong Peningkatan Peningkatan	60
BAB IV	PENGARUH KEBIJAKAN DEVALUASI	71
	NILAI MATA UANG RUPIAH 12 SEPTEMBER 1986 TERHADAP NERACA TAHUN 1987-1991	
	A. Neraca Pembayaran Indonesia Kaitannya dengan Ekpor dan Impor Setelah Di Keluarkannya Paket Lanjutan Devaluasi Nilai Mata Uang Rupiah 12 September 1986 Tahun 1987-1991	71
	B. Pengaruh Kebijakan Devaluasi Nilai Mata Uang Rupiah Terhadap Neraca Perdagangan Luar Negeri kaitanya dengan Ekspor dan Impor Tahun 1987-1991	81
	1. Ekspor	84
	2. Impor	89
BAB V	SIMPULAN	93
	DAFTAR PUSTAKA	95
	LAMPIRAN	99

DAFTAR SINGKATAN

<i>ADB</i>	: <i>Asian Development Bank.</i>
<i>ALC</i>	: <i>Arabian Light Crude.</i>
<i>APBN</i>	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
<i>BAPPENAS</i>	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
<i>BPH</i>	: Badan Pengatur Hilir (Minyak dan Gas Bumi).
<i>CCCN</i>	: <i>Custums Cooperation Council Nomenclature.</i>
<i>IDB</i>	: <i>Islamic Development Bank.</i>
<i>IFC</i>	: <i>International Finance Corporation.</i>
<i>IGGI</i>	: <i>Inter-Governmental Group on Indonesia.</i>
<i>IMF</i>	: <i>International Money Fund.</i>
<i>INPRES</i>	: Instruksi Presiden.
<i>LKP</i>	: Laporan Kebenaran Pemeriksaan.
<i>LNG</i>	: <i>Liquefied Natural Gas (Gas Alam Cair).</i>
<i>Migas</i>	: Minyak dan Gas Bumi.
<i>ODA</i>	: <i>Official Development Assistance.</i>
<i>OPEC</i>	: <i>Organization of Petroleum Exporting Countries.</i>
<i>PAKEM</i>	: Paket Kebijakan 6 Mei 1986.
<i>Pelita</i>	: Pembangunan Lima Tahun.
<i>PMA</i>	: Penanaman Modal Asing.
<i>PMDN</i>	: Penanaman Modal Dalam Negeri.
<i>GSG</i>	: <i>Societe Generale de Surveillance.</i>
<i>SKFLN</i>	: Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri.

DAFTAR ISTILAH¹

<i>Apresiasi nilai tukar</i>	: Proses peningkatan nilai mata uang dalam negeri yang disebabkan adanya mekanisme perdagangan.
<i>Bea masuk</i>	: Pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang masuk daerah pabean.
<i>Bank sentral</i>	: Institusi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara terkait dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut.
<i>Barang baku</i>	: Barang berupa bahan yang digunakan dalam membuat produk, dalam hal ini bahan tersebut secara menyeluruh tampak pada produk jadi (setengah jadi).
<i>Barang konsumsi</i>	: Barang yang dipakai secara langsung atau tidak langsung oleh konsumen untuk keperluan pribadi atau rumahtangga yang bersifat sekali habis.
<i>Barang modal</i>	: Barang buatan manusia dan barang tahan lama yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa.
<i>Barang penolong</i>	: Barang yang dimanfaatkan dalam proses, namun bukan merupakan bagian dari bahan baku utama untuk produksi yang dihasilkan.
<i>Barrel</i>	: Satuan volume yang dipakai untuk minyak bumi.
<i>Bonanza minyak</i>	: Sumber keuntungan yang diperoleh dari

¹Pengertian dalam daftar istilah ini disusun berdasar pada pendapat para ahli dalam kamus, referensi, dan pendapat pribadi.

- naiknya harga minyak bumi.
- Boom investasi* : Masa banjir investasi yang masuk ke Indonesia.
- Boom minyak bumi* : Periode banjir minyak bumi akibat penurunan harga minyak bumi karena terjadinya resesi harga minyak bumi tahun 1982.
- Debit service ratio* : Dalam pengelolaan keuangan dikenal dengan DLR atau rasio utang terhadap pendapatan, yang berarti beban jumlah beban pembayaran negara dan cicilan pokok utang luar negeri jangka panjang yang dibagi dengan jumlah penerimaan ekspor.
- Defisit* : Berkurangnya kas dalam keuangan negara, dimana pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan pemasukan.
- Depresiasi nilai tukar* : Proses penurunan nilai mata uang dalam negeri yang disebabkan adanya mekanisme perdagangan.
- Devaluasi* : Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap nilai mata uang asing, dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah ekspor ke luar negeri, membatasi jumlah impor dan menambah devisa.
- Devisa* : Sejumlah emas atau valuta asing yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional.
- Diversifikasi ekonomi* : Usaha penganeekaragaman produk (bidang usaha) atau lokasi perusahaan yang dilakukan suatu perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan arus kas perusahaan dapat lebih stabil, dengan alasan untuk mengatasi krisis ekonomi.
- Dollar* : Mata uang resmi Amerika Serikat.
- Domestik* : Sesuatu yang berhubungan dengan atau mengenai permasalahan dalam negeri

- (yang bersifat kerumahtanggaan).
- Ekonomi biaya tinggi* : Hasil dari praktik ekonomi ilegal yang memainkan peranan penting dalam membantu mempercepat tekanan inflasi, penghambat faktor fundamental seperti nilai tukar dan persediaan barang dan uang.
- Ekonomi makro* : Studi tentang ekonomi secara keseluruhan yang menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar.
- Ekspor* : Penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas, dan syarat penjualan lainnya yang disetujui oleh pelaku ekspor dan pelaku impor.
- Eksploitasi* : Tindakan mencari atau melakukan penjelajahan dengan tujuan menemukan hasil minyak bumi.
- Embargo* : Pelarangan perniagaan dan perdagangan dengan sebuah negara, umumnya digunakan dalam perniagaan dan politik internasional. Embargo dideklarasikan oleh sekelompok negara terhadap negara lain untuk mengisolasi dan menyebabkan pemerintah negara tersebut dalam keadaan internal yang sulit.
- IGGI* : Sebuah kelompok internasional yang didirikan pada tahun [1967](#), diprakarsai oleh [Amerika Serikat](#) untuk mengkoordinasikan dana bantuan multilateral kepada [Indonesia](#).
- Imbal Beli : Sistem itu merupakan bentuk dari perdagangan yang klasik. Perjanjian imbal beli mengatur bahwa penjual memperoleh bayaran biasa dengan syarat bahwa ia akan menggunakan sebagian atau seluruh pembayaran itu untuk membeli komoditi produk hasil negara pembeli. Perjanjian itu diatur dengan cara terpisah, yaitu kontrak primer untuk ekspor barang pemasok dan kontrak sekunder untuk impor barang lain,

- dengan pengiriman barang dan pembayaran yang terpisah kepada masing-masing arah.
- Impor* : Proses pembelian barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain.
- Jasa* : Aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumsi atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.
- Joint venture* : Suatu perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih entitas bisnis untuk menyelenggarakan bisnis bersama dalam jangka waktu tertentu.
- Kawasan Berikat* : Suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
- Kebijakan Moneter* : Proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan seperti, menahan inflasi dan menciptakan kesejahteraan
- Komoditi* : Benda nyata yang mudah diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik. Dapat disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu dan dapat dipertukarkan dengan produk lainnya dengan jenis yang sama, biasanya dapat dibeli atau dijual oleh investor melalui bursa berjangka
- Kuota* : Pembatasan jumlah barang yang dapat di impor oleh suatu negara dari semua negara atau dari negara-negara tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan.
- Kurs (Nilai tukar)* : Sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran

saat kini atau di kemudian hari, antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah.

- Kurs Tengah* : Kurs antara kurs jual dan kurs beli atau penjumlahan antara kurs jual dan kurs beli lalu dibagi dua (kurs rata-rata). Kurs beli adalah kurs yang digunakan pedagang *valas* atau *bank* menjual valuta asing atau mata uang asing atau jika kita akan menukarkan mata uang negara kita dengan mata uang negara asing yang kita inginkan dan kurs jual adalah kurs yang digunakan pedagang *valas* atau *bank* membeli valuta asing atau jika kita menukarkan *valas* dengan mata uang negara kita.
- Manufaktur* : Suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan dan tenaga kerja dan suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual.
- Modal* : Sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan.
- Negara Industri* : Klasifikasi negara yang mempunyai perekonomian sangat baik, namun belum mencapai tahap negara maju dan berdasarkan hasil ekspor negara tersebut.
- Neraca pembayaran* : Merupakan gambaran kondisi ekonomi suatu negara kaitannya terhadap ekonomi internasional dan hak serta kewajiban suatu Negara terhadap luar negeri.
- Neraca perdagangan luar negeri* : Semua transaksi yang menyangkut ekspor dan impor barang dagangan (komoditi).
- ODA* : *Official Development Assistance* atau bantuan pembangunan resmi yang disusun oleh [Komite Bantuan Pembangunan Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi yang berdiri pada tahun 1969 dengan tujuan](#) untuk mengukur aliran bantuan internasional. Statistik ini banyak digunakan oleh para akademisi dan jurnalis sebagai indikator

- yang mudah untuk mengukur aliran bantuan internasional.
- Outward-looking* : Kemamuan memandang kedepan terkait strategi pemasaran industri dalam strategi promosi ekspor.
- Overvalued* : Sebuah harga saham yang dilihat terlalu tinggi dengan harga pendapatan rasio perusahaan, laba, atau kondisi keuangan.
- Pabean* : Instansi (jawatan, kantor) yang mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk (impor) dan bea keluar (ekspor), baik melalui darat, laut, maupun melalui udara. Instansi yang menjalankan tugas-tugas ini di Indonesia adalah [Direktorat Jenderal bea dan cukai](#) sebagai unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi [Departemen Keuangan Republik Indonesia](#) di bidang kepabeanan dan cukai.
- Perang Harga* : Terjadinya persaingan diantara pemasok suatu barang yang bersaing, yang terpusat pada pemotongan harga yang agresif. Keadaan itu timbul ketika permintaan untuk suatu produk berkurang harga dan bersamaan terjadi kelebihan kapasitas penawaran.
- Perang Teluk I* : Inflasi Irak ke Kwait pada tahun 1990 yang menyebabkan munculnya pasukan Kwait pimpinan Amerika untuk memerangi Irak guna membebaskan Kwait.
- Pertumbuhan ekonomi* : Proses perubahan kondisi ekonomi suatu negara secara berkeseimbangan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.
- Reschedalling* : Perubahan jadwal pembayaran debitur atau jangka waktu (bank akan menawarkan penjadwalan utang dimana tenor kredit bisa diperpanjang sehingga beban angsuran berkurang.
- Resesi ekonomi* : Kondisi ketika pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal atau

- lebih dalam satu tahun.
- Struktur ekonomi* : Komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian negara.
- Suku Bunga* : Persentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa (bunga) dalam suatu periode tertentu.
- Surplus* : Meningkatnya kas dalam keuangan negara.
- SWAP* : Transaksi pertukaran dua *valas* melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka, atau penjualan tunai dengan pembelian kembali secara berjangka, dengan tujuannya untuk mendapatkan kepastian kurs (kurs bersifat tetap selama kontrak), sehingga dapat menghindari kerugian selisih kurs.
- Tarif* : Pungutan yang dikenakan terhadap barang ketika masuk atau keluar batas negara.
- Tataniaga* : Suatu proses dari pertukaran yang mencakup serangkaian kegiatan untuk memindahkan barang-barang atau jasa-jasa dari sektor produksi ke sektor konsumsi.
- Valuta asing* : Mata uang asing yang diakui dan diterima dalam sistem perdagangan internasional.

DAFTAR TABEL

2.1	Harga Ekspor Minyak Bumi Indonesia Tahun 1973-1986.	22
2.2	Peranan Penerimaan Migas Terhadap Penerimaan Dalam Negeri dan APBN Tahun 1983/1984-1985/1986.	26
2.3	Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 1982/1983-1985/1986.	30
2.5	Berat Bersih dan Nilai f.o.b Komoditi Ekspor Indonesia Tahun 1983-1985.	36
2.6	Impor Menurut Golongan Barang Ekonomi Tahun 1983-1985.	39
2.7	Berat Bersih dan Nilai f.o.b Komoditi Impor Indonesia Tahun 1983-1985.	40
3.1	Produksi Minyak Bumi Dunia Tahun 1982 dan 1985.	51
3.2	Produksi dan Kuota Negara-negara Anggota OPEC.	52
3.3	Neraca Pembayaran Tahun 1985/1986-1986/1987.	53
4.1	Neraca Pembayaran Tahun 1986/1987-1991/1992.	74

DAFTAR GRAFIK

2.4	Neraca Perdagangan Luar Negeri Indonesia Tahun 1982/1983-1985/1986.	34
4.2	Neraca Perdagangan Indonesia Tahun 1986/1987-199/1992.	82

DAFTAR LAMPIRAN

A. Lampiran 1: Perkembangan Impor di Luar Minyak Bumi dan Gas Bumi Menurut Golongan Ekonomi Tahun 1988-1992.	99
B. Lampiran 2: Nilai Beberapa Barang Ekspor di Luar Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun 1988/1989-1991/1992.	100
C. Lampiran 3: Nilai Beberapa Barang Ekspor di Luar Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun 1986/1987-1988/1989.	101
D. Lampiran 4: Keputusan I Menteri Keuangan R.I Nomor: 915/KMK.05/1986, terkait Daftar Barang Impor Yang Mendapatkan Perubahan Tarif Bea Masuk.	102
E. Lampiran 5: Pengumuman Pemerintah Mengenai Kebijakan Devaluasi 12 Septembet 1986 yang di keluarkan oleh Menteri Keuangan R.I.	111
F. Lampiran 6: Penjelasan Menteri Koordinator Ekuin dan Pengawasan Pembangunan Prof. DR. Ali Wardhana Tentang Kebijakan Tindak Lanjut Devaluasi.	115
G. Lampiran 7: Sumber Surat Kabar.	120

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji mengenai “Kebijakan Devaluasi Nilai Mata Uang Rupiah 12 September 1986: Pengaruhnya terhadap Neraca Perdagangan Luar Negeri Tahun 1987-1991”. Terdapat hubungan fungsional antara kebijakan devaluasi 12 September 1986 dan perkembangan neraca perdagangan luar negeri Indonesia setelah itu. Devaluasi merupakan kebijakan yang di keluarkan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap nilai mata uang asing, dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah ekspor ke luar negeri, menekan impor dan menambah devisa. Terjadinya devaluasi 12 September 1986 telah menyebabkan perubahan penting dalam neraca perdagangan luar negeri Indonesiatahun 1987-1991. Melalui devaluasi ini, terjadi perubahan dalam komposisi ekspor Indonesia. Sebelum devaluasi 12 September 1986, ekspor Indonesia selalu didominasi oleh sektor migas, tetapi dengan devaluasi 12 September 1986 peran sektor migas yang sebelumnya selalu menjadi penyumbang utama devisa negara mulai digantikan oleh sektor non-migas. Dengan demikian, Devaluasi 12 September 1986 berperan penting dalam mengubah struktur ekonomi Indonesia, khususnya dalam neraca perdagangan luar negeri Indonesia dari sektor migas ke sektor non-migas. Kebijakan itu bertujuan untuk mempertahankan cadangan devisa sekaligus memperkuat neraca pembayaran pada tingkat yang sehat dengan cara mendorong ekspor non-migas dan menekan impor. Hasil dari Devaluasi 12 September 1986 adalah terjadinya peningkatan nilai ekspor non-migas Indonesia, khususnya ekspor hasil-hasil industri yang mengalami pertumbuhan sangat pesat sejak tahun anggaran 1987/1988. Ekspor non-migas untuk pertama kali sejak tahun 1973 nilainya melebihi nilai ekspor migas. Kondisi itu membawa konsekuensi dalam perdagangan luar negeri Indonesia. Karena terjadi kenaikan nilai impor setelah devaluasi dan paket lanjutannya. Akan tetapi, hal yang menarik adalah kenaikan nilai impor itu ada pada komoditi bahan baku/penolong dan barang modal. Sebaliknya pada komoditi barang-barang komsumtif prosentase nilai impornya meski mengalami kenaikan namun kenaikan tersebut dapat ditekan. Keadaan itu menunjukkan bahwa impor Indonesia digunakan untuk kegiatan yang bersifat produktif. Dengan kata lain, beberapa sektor industri substitusi impor telah berkembang sejak adanya Paket Devaluasi 1986. Dengan demikian, paket kebijakan itu berhasil mengubah ekonomi Indonesia yang semula bertumpu pada komoditi migas menjadi beralih pada komoditi non-migas. Dengan kata lain tujuan jangka panjang kebijakan devaluasi 12 September 1986 dapat dicapai dengan adanya perubahan struktur ekonomi secara nasional.

ABSTRACT

This study discusses “Rupiah Currency Values Devaluation Policy on September 12, 1986: The Impact on International Trade Balance in 1987-1991”. There is a functional relation between devaluation policy on September 12, 1986, and the development of Indonesia’s international trade balance at the end of the 1980s. The devaluation caused important changes in Indonesia’s international trade balance after that. Devaluation is a policy issued by the government to reduce the value of the domestic currency against the value of foreign currencies, with the aim of increasing the amount of exports abroad, suppressing imports and increasing foreign exchange. The devaluation of 12 September 1986 caused an important change in Indonesia’s foreign trade balance in 1987-1991. This devaluation has changed the composition of Indonesia’s exports. Before the devaluation on September 12, 1986, the oil-and-gas sector had always been dominated Indonesia’s exports, but as the devaluation occurred, the oil-and-gas sector that plays a prominent role in foreign exchange started to be replaced by non-oil-and-gas sector. Thus, the devaluation on September 12, 1986, has an important role in changing Indonesia’s economic structure, especially in Indonesia’s international trade balance from the oil and gas sector to the non-oil-and-gas sector. The purposes of this policy are to maintain the foreign exchange reserves and to strengthen the balance of payment at a good rate by boosting the non-oil-and-gas exports and shrinking its imports. The devaluation on September 12, 1986, caused the increase in Indonesia’s non-oil-and-gas export values, more specifically in industrial products exports that grow very rapidly since the fiscal year 1987/1988. For the first time since 1973, the value of non-oil-and-gas export surpasses oil-and-gas export value. This condition had affected Indonesia’s international trade since its import value has increased after the devaluation and the whole sequences. However, it is interesting that the boost of import values happened in raw and auxiliary materials commodities and capital goods. On the other hand for commodity commodities, the percentage of import value, although it has increased, the increase can be suppressed. It shows that Indonesia’s imports were used for productive activities. In other words, some industrial import-substitution sectors have been developed since Devaluation in 1986 happened. Therefore, a set of this policy has been successful in changing Indonesia’s economy as it used to be merely dependent on oil-and-gas commodities and then non-oil-and-gas commodities appear as an alternative. Lastly, the long-term purpose of the devaluation policy in September 12, 1986, can be reached through the changes in the economic structure nationally.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Devaluasi merupakan kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang suatu negara terhadap nilai mata uang asing.² Negara akan melakukan devaluasi jika keadaan nilai tukar mata uang negara tersebut dinilai terlalu tinggi (*over-valued*).³ Keadaan demikian itu akan menyebabkan ketidakmampuan perhitungan biaya dan harga serta menghambat perdagangan internasional. Dengan dasar itu, kurs mata uang harus sedapat-dapatnya dijaga agar tetap, tetapi apabila perlu dapat disesuaikan namun harus berkomunikasi dengan *International Money Fund* (IMF).⁴ Dalam hal ini, nilai tukar atau kurs mata uang menyangkut hubungan internasional, sehingga negara tidak dapat senaknya menetapkan nilai kurs mata uang.⁵ Oleh karena itu ada aturan-aturan internasional yang harus diperhatikan bagi setiap negara terkait dengan penetapan kurs mata uangnya.⁶ Dalam konferensi di Bretton Woods yang diadakan pada tahun 1944, disetujui suatu

²Iskandar Simorangkir, *Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar, Seri Kebanksentralan, No.12*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2004) Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), hlm. 4. (<https://www.bi.go.id/id/publikasi/seri-kebanksentralan/Documents/12.%20Sistem%20dan%20Nilai%20kebijakan%20Nilai%20Tukar.pdf>, diunduh pada tanggal 20 Mei 2019).

³Overvalurd adalah harga saham yang dilihat terlalu tinggi dengan harga pendapatan rasio perusahaan, laba, atau kondisi keuangan.

⁴Tugas IMF adalah sebagai kordinator dan pengawas bagi negara anggotanya. Dalam pengaruhnya, kurs-kurs mata uang yang ditetapkan tidak bersifat mutlak, melainkan sebuah patokan. Lebih jelas periksa; T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi, Bagian Mikro edisi revisi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm. 304.

⁵Kurs adalah nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat kini atau di kemudian hari, antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah.

⁶T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi, Bagian Mikro edisi revisi*, (2004), hlm, 305.

sistem pembayaran internasional yang bertujuan menjamin stabilitas kurs mata uang, atas dasar suatu perbandingan antar kurs valuta asing dari masing-masing negara anggota dengan emas dan dollar Amerika Serikat.⁷

Kurs mata uang dalam perdagangan internasional secara tidak langsung ditentukan oleh adanya permintaan dan penawaran valuta asing yang berasal dari transaksi perdagangan internasional, yaitu total nilai ekspor, impor barang dan jasa dalam neraca pembayaran.⁸ Dengan dasar itu, semakin tinggi nilai ekspor suatu negara dibanding nilai impornya akan menyebabkan rendahnya permintaan valuta asing, dalam hal ini Dollar Amerika. Keadaan itu menyebabkan nilai tukar mata uang domestik akan meningkat terhadap Dollar Amerika. Dengan kata lain, terjadi apresiasi nilai tukar domestik terhadap Dollar Amerika.⁹ Kondisi itulah yang menyebabkan nilai ekspor dan impor mempengaruhi neraca pembayaran dan output perekonomian secara keseluruhan.¹⁰ Oleh karena itu, neraca pembayaran dan kurs valuta asing memiliki hubungan yang erat. Dalam hal ini, terjadinya defisit neraca pembayaran akan menyebabkan nilai tukar domestik merosot.¹¹ Keadaan itu disebabkan jika nilai impor dan arus-arus modal luar negeri melampaui nilai total dari ekspor dan arus-arus modal masuk.¹²

⁷Valuta Asing adalah mata uang asing yang diakui dan diterima dalam sistem perdagangan internasional.

⁸T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, Bagian Mikro Jilid 2*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm 114.

⁹Apresiasi nilai tukar adalah proses peningkatan nilai mata uang dalam negeri yang disebabkan adanya mekanisme perdagangan.

¹⁰Neraca pembayaran adalah gambaran kondisi ekonomi suatu negara kaitannya terhadap ekonomi internasional dan hak serta kewajiban suatu negara terhadap luar negeri.

¹¹Defisit adalah berkurangnya kas dalam keuangan negara, dimana pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan pemasukan.

¹²T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, Bagian Mikro Jilid 2*, (1994), hlm 114.

Terkait dengan hal di atas, tinggi rendahnya kurs mata uang memiliki pengaruh besar terhadap ekspor-impor dan pembangunan suatu negara.¹³ Keadaan itu disebabkan harga barang-barang ekspor dan impor negara dipengaruhi nilai mata uang lokal terhadap mata uang asing.¹⁴ Rendahnya nilai tukar mata uang suatu negara akan menyebabkan murahnya harga komoditi ekspor negara tersebut. Pada gilirannya volume ekspor negara itu akan meningkat, sehingga nilai ekspornya bertambah. Ujungnya adalah terdapat surplus dalam neraca perdagangan luar negeri negara yang bersangkutan.¹⁵ Dengan demikian, salah satu kebijakan yang diambil pemerintah jika terjadi defisit dalam neraca pembayaran yang disebabkan nilai impor melampaui nilai ekspor adalah dengan melakukan devaluasi. Dalam hal ini, salah satu tujuan devaluasi adalah membuat komoditi ekspor menjadi murah dilihat dari kurs mata uang asing sehingga dapat merangsang ekspor dan diharapkan dapat mengurangi permintaan akan impor.¹⁶ Akibatnya harga produk impor menjadi mahal, sehingga terdapat pergeseran konsumsi barang-barang di dalam negeri. Dalam hal ini, mahalnya harga produk impor, akan menyebabkan konsumen dalam negeri beralih ke produk domestik. Pada akhirnya adalah terjadi peningkatan aliran modal atau devisa ke dalam negeri, karena ekspor meningkat sedangkan impor berkurang.¹⁷ Dalam jangka panjang tujuan kebijakan tersebut akan menyebabkan terjadinya perubahan struktur ekonomi secara nasional.

¹³Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas, dan syarat penjualan lainnya yang disetujui oleh pelaku ekspor dan pelaku impor dan impor adalah Proses pembelian barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain.

¹⁴Iskandar Simorangkir, *Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar, Seri Kebanksentralan, No.12*, (2004), hlm. 31. (Diunduh pada tanggal 20 Mei 2019).

¹⁵Surplus adalah meningkatnya kas dalam keuangan negara.

¹⁶Sritua Arif, "Devaluasi dan Liku-liku Efeknya", *SINAR HARAPAN*, 19 September 1986, hlm. 1.

¹⁷Devisa adalah sejumlah emas atau valuta asing yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional.

Secara keseluruhan Pemerintah Indonesia telah melakukan empat kali tindakan devaluasi rupiah terhadap mata uang Dollar Amerika, yaitu pada tahun 1971, 1978, 1983, dan 1986. Semua itu tidak bisa dilepaskan dari perkembangan neraca pembayaran dan kondisi cadangan devisa Indonesia. Perkembangan neraca pembayaran Indonesia, selama periode Pelita II sampai dengan tiga tahun pertama Pelita III yaitu dari 1974/1975 sampai dengan 1981/1982, ditandai dengan ekspor barang-barang primer sebesar 96% dari total nilai ekspor. Ekspor komoditi primer yang paling menonjol adalah migas, yang dalam prosentasenya mencapai 72% dari total nilai ekspor Indonesia.¹⁸ Periode itu sering disebut dengan bonanza minyak.¹⁹ Hal itu disebabkan terjadinya pelonjakan harga minyak dari US\$ 10.80/barrel di Bulan Januari tahun 1974, menjadi US\$ 35.00/barrel di Bulan Januari 1981. Hal itu disebabkan embargo minyak terhadap negara-negara industri Barat akibat perang Arab-Israel yang meletus pada bulan Oktober 1973.²⁰ Kondisi itu menyebabkan terjadi peningkatan nilai ekspor migas, sehingga mampu mendorong peningkatan kegiatan pembangunan pada periode itu.

Memasuki periode tahun 1982/1983 terjadi kendala pada neraca pembayaran, terutama disebabkan beberapa faktor yang bersifat eksternal. Pertama situasi ekonomi dunia yang belum bebas dari pengaruh resesi yang melanda dunia sejak tahun 1980. Kedua, nilai tukar rupiah yang *overvalued*, dalam arti nilai tukar rupiah terlalu tinggi terhadap valuta asing, *ketiga* perkembangan harga minyak yang mulai mengalami penurunan sejak akhir tahun 1982 yang disebut periode “boom” minyak dan *Keempat*, terjadi pelarian dollar

¹⁸*Masalah Pokok dan Prospek Perekonomian Indonesia 1987*, (Jakarta: Hasil Seminar, Bank Indonesia 16-18 Februari 1987), hlm. 101.

¹⁹Boom minyak adalah masa banjir minyak bumi akibat adanya kenaikan harga minyak bumi di pasar internasional.

²⁰Embargo minyak adalah pelarangan perniagaan dan perdagangan dengan sebuah negara, umumnya digunakan dalam perniagaan dan politik internasional. Embargo dideklarasikan oleh sekelompok negara terhadap negara lain untuk mengisolasi dan menyebabkan pemerintah negara tersebut dalam keadaan internal yang sulit. Petron Curie, “OPEC setelah Yamani, Strategi Perang Harga Ditinggalkan?”, *Buletin Ekonomi BAPINDO*, September 1986, hlm. 79.

yang terjadi pada tahun 1983.²¹ Kondisi itu masih ditambah adanya permasalahan yang bersifat internal, misalnya terjadinya kelemahan struktural dalam perekonomian Indonesia, ekonomi biaya tinggi, dan adanya ketimpangan perekonomian regional pada masa itu.²² Keadaan yang serba sulit pada periode itu menyebabkan terjadinya tekanan pada neraca pembayaran Indonesia.

Keadaan yang kurang menguntungkan bagi perekonomian Indonesia masih terus berlanjut hingga memasuki periode tahun 1985/1986. Penyebab utamanya adalah harga minyak bumi yang terus mengalami kemerosotan secara tajam, terutama pada bulan Agustus. Saat itu, harga minyak bumi yang sempat melambung hingga mencapai US\$ 30/barrel jatuhnya hingga US\$ 9.83/barrel.²³ Keadaan itu masih ditambah dengan gagalnya *Organization of Petroleum Exporting Countries* (OPEC), untuk mencapai kesepakatan harga minyak bumi.²⁴ Semuanya itu menyebabkan penerimaan dalam negeri dari sektor migas mengalami penurunan yang tajam. Kondisi itu menyebabkan terjadinya defisit dalam neraca pembayaran, sehingga menyebabkan ketidak stabilan perekonomian Indonesia secara struktural. Akibatnya adalah terganggunya pembangunan Indonesia. Dengan dasar itu pemerintah kemudian mengambil tindakan penyesuaian berupa kebijakan devaluasi yang diberlakukan pada tanggal 12

²¹Soeharsono Sangir, *Ekonomi Indonesia Menghadapi Pelita IV*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 116.

²²Ekonomi biaya tinggi adalah hasil dari praktik ekonomi illegal yang memainkan peranan penting dalam membantu mempercepat tekanan inflasi, penghambat faktor fundamental seperti nilai tukar dan persediaan barang dan uang. *Masalah Pokok dan Prospek Perekonomian Indonesia 1987*, (1987), hlm. 35.

²³*Himpunan Kebijakan Pemerintah tanggal 12 September 1986, 2 Oktober 1986, 25 Oktober 1986 dan 15 September 1987 di Bidang Moneter, Perpajakan, Penanaman Modal, dan Pengembangan serta Perlindungan Industri dalam Negeri*, (Jakarta: Departemen Keuangan RI, 1987), hlm. 5.

²⁴*Priasmoro Prawiroardjo, Sebab dan Prospek devaluasi 12 September*, KOMPAS. 20 September 1986, hlm. 1.

September 1986.²⁵ Dalam hal ini, besarnya tingkat devaluasi itu adalah 45% dari nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.²⁶ Meskipun kenyataannya cadangan devisa dari sektor migas mengalami penurunan yang tajam namun, sebelum tindakan devaluasi 1986 menteri ekonomi dan bank sentral menegaskan keadaan ekonomi dan devisa negara masih tetap stabil, sehingga disimpulkan kebijakan devaluasi tidak diperlukan, kondisi itu didasarkan atas keadaan ekonomi-makro Indonesia.²⁷ Akan tetapi, pada kenyataannya pemerintah tetap melakukan tindakan itu. Dengan alasan adanya ketidakpastian harga minyak bumi di antara negara OPEC, situasi perekonomian dunia diakibatkan resesi yang masih berkelanjutan dan menurunnya peranan ekspor migas dalam penerimaan dalam negeri yang begitu besar yang menyebabkan terjadinya defisit dalam neraca pembayaran.²⁸

²⁵Devaluasi adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap nilai mata uang asing, dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah ekspor ke luar negeri, membatasi jumlah impor dan menambah devisa.

²⁶*Himpunan Kebijakan Pemerintah tanggal 12 September 1986, 2 Oktober 1986, 25 Oktober 1986 dan 15 September 1987 di Bidang Moneter, Perpajakan, Penanaman Modal, dan Pengembangan serta Perlindungan Industri dalam Negeri*, hlm. 3.

²⁷Selama beberapa bulan terakhir bulan September 1986, tingkat inflasi rendah sekali yang sangat mungkin menandakan bahwa pemerintah tidak menginjeksikan uang banyak di masyarakat, lewat (*deficit preending*) anggaran belanja ataupun dengan likuiditas kredit murah. Hal yang terakhir juga terbaca dari mutasi uang yang beredar selama semester pertama tahun 1986 hanya separuh dari semester pertama tahun lalu, demikian pula perluasan kredit kurang dari tahun yang lalu. Ekspor semester pertama tahun 1986 juga berjalan normal, dengan masih ada kenaikan pada ekspor non-migas. Paling penting adalah keterangan Gubernur Bank Sentral, dekat dengan hari devaluasi itu, bahwa cadangan devisa secara keseluruhan masih kuat dan stabil yakni sekitar 10,7 miliar dollar yang berarti tidak ada kemunduran. Lebih jelas periksa; Mohammad Sadli, Pengkajian Mengenai Devaluasi 12 September, *KOMPAS*, 30 September 1986, hlm. 1.

²⁸Resesi ekonomi adalah Kondisi ketika produk domestik bruto menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun.

Semua itu menyebabkan timbulnya kecemasan pemerintah karena sebagian besar pendapatan devisa berasal dari ekspor minyak bumi. Dalam hal ini, jika terjadi pengurangan penerimaan devisa pada suatu negara dalam jumlah besar, maka berpengaruh terhadap keseimbangan neraca pembayaran dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, untuk menghadapi keadaan yang serba sulit langkah yang harus diambil pemerintah berdasarkan akibat yang ditimbulkan adalah dengan menjaga neraca pembayaran dalam keadaan sehat sehingga dapat memelihara jalanya pembangunan.

Usaha pemerintah dalam menciptakan keadaan ekonomi yang stabil akibat tekanan-tekanan yang dirasakan perekonomian Indonesia terutama setelah periode “boom” minyak selain dengan mengadakan kebijakan Devaluasi nilai mata uang rupiah 12 September 1986 juga dengan melakukan beberapa kebijakan yaitu, Devaluasi 30 Maret 1983, Inpres No.4 tahun 1985 dan kebijakan 6 Mei 1986 (PAKEM). Semua kebijakan itu terkait dengan usaha pemerintah dalam menggali sumber daya dari luar sektor migas. Dengan adanya kemerosotan tajam harga minyak bumi dalam tahun 1986, pemerintah lebih berusaha lagi mendorong perekonomian Indonesia, khususnya dari sektor ekspor non-migas. Dengan dasar itu, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan lanjutan paska kebijakan devaluasi nilai mata uang rupiha 12 September 1986. Dalam hal ini, pemerintah mengharapkan terjadinya perubahan struktur ekonomi secara nasional. Oleh karena sebelum adanya paket kebijakkan itu, struktur ekonomi Indonesia menunjukkan karakter ketergantungan pada sektor migas. Keadaan itu dapat dilihat dari peran sektor migas sebesar 70,6% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 1981/1982.²⁹ Dengan kebijakan itu semua pemerintah mengharapkan adanya peningkatan bukan hanya dari sektor migas melainkan pula dari sektor non-migas.

Guna tercapainya tujuan dari kebijakan devaluasi nilai mata uang rupiah 12 September 1986 pemerintah mengadakan tidak lanjut dengan mengeluarkan paket kebijakan 25 Oktober 1986 dan paket kebijakan 15 Januari 1987. Dalam hal

²⁹Soeharsono Sangir, *Ekonomi Indonesia Menghadapi Pelita IV*, (1985), hlm.58.

ini, semua paket kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan menggali sumber-sumber devisa dalam negeri di luar sektor migas, mengurangi ekonomi biaya tinggi dan kedepannya ekspor kita lebih kompetitif di Pasar Internasional, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan ekspor barang-barang di luar sektor migas. Dalam jangka panjang tujuan kebijakan tersebut adalah terjadinya perubahan struktur ekonomi secara nasional khususnya dalam bidang ekspor.

Berdasar latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara kebijakan devaluasi nilai mata uang rupiah 12 September 1986 dan perkembangan neraca perdagangan luar negeri Indonesia periode 1987 sampai dengan 1991. Permasalahan itu akan dipandu dengan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Apa itu kebijakan devaluasi nilai mata uang rupiah 12 September 1986.
2. Bagaimana hubungan antara kebijakan devaluasi nilai mata uang rupiah 12 September 1986 dengan neraca perdagangan luar negeri Indonesia tahun 1986 dengan 1991.
3. Bagaimana pengaruh kebijakan devaluasi nilai mata uang rupiah 12 September 1986 terhadap perkembangan neraca perdagangan luar negeri Indonesia tahun 1987 sampai dengan 1991.

B. Ruang Lingkup

Pembatasan ruang lingkup dalam penelitian sejarah diperlukan agar penelitian dapat lebih terfokus dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara empiris dan metodologis.³⁰ Ada tiga ruang lingkup, yakni spasial, temporal, dan keilmuan. Lingkup spasial dalam skripsi ini adalah lingkup nasional. Hal ini didasarkan alasan dari diadakkanya kebijakan devaluasi nilai mata uang rupiah 12 September 1986, terkait terjadinya kemerosotan tajam harga minyak bumi di Pasar Dunia yang menyebabkan defisit dalam neraca pembayaran Indonesia sehingga mempengaruhi jalannya pembangunan. Dalam hal ini, kebijakan tersebut

³⁰Taufik Abdullah, editor, *“Sejarah Lokal di Indonesia: Kumpulan Tulisan”* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985), hlm. 10.

berkaitan dengan ekonomi makro, karena kebijakan itu ditujukan untuk mendorong ekspor non-migas dan mengurangi impor.³¹

Lingkup temporal skripsi ini adalah antara tahun 1983 sampai dengan tahun 1991. Tahun 1983 dipilih sebagai batas awal kajian dengan alasan pada tahun itu terjadi devaluasi tepatnya tanggal 30 Maret 1983 yang salah satu alasannya dilatarbelakangi adanya kemerosotan harga minyak bumi di Pasar Dunia. Tahun 1991 dipilih sebagai batas akhir karena tahun ini terjadi perubahan arah kebijakan industrialisasi yang menggaaris bawahinya adanya peningkatan efisiensi, persaingan, dan orientasi ekspor.³²

Sementara itu, lingkup keilmuan skripsi ini adalah sejarah ekonomi. Kajian sejarah ekonomi ini pokok perhatian pada pembahasan proses dan perubahan ekonomi yang berjalan bersamaan waktu, lebih khusus masalah perubahan struktural jangka panjang yang mendasari esensi perkembangan ekonomi.³³ Deskripsi dalam sejarah ekonomi juga mencangkup aspek pengaruh peristiwa ekonomi yang dikaji yaitu kebijakan devaluasi nilai mata uang rupiah 12 September 1986 yang mendasari perkembangan ekonomi pada tahun 1986 sampai dengan tahun 1991.

C. Tujuan Penelitian

Didasarkan pada latar belakang masalah dan batasan ruang lingkup, dalam penelitian ini ada beberapa tujuan penelitian dengan maksud memperjelas fokus analisis sebagai berikut. *Pertama*, menjelaskan apa itu kebijakan devaluasi nilai mata uang rupiah 12 September 1986. *Kedua*, mengkaji hubungan antara kebijakan devaluasi nilai mata uang rupiah 12 September 1986 dengan neraca

³¹Ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan yang menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar.

³²THEE, Kian Wie, *Industrialisasi di Indonesia Berbagai kajian* terjemahan Maria Pangestu, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1996), hlm. xxii.

³³Sumitro Djojohadikusumo, "*sejarah Ekonomi Baru Sebagai Tantangan Baru*" (Jakarta: LP3ES, 2000), hlm. 58.

perdagangan luar negeri Indonesia periode 1987 sampai dengan 1991. *Ketiga*, menjelaskan pengaruh kebijakan devaluasi nilai mata uang rupiah 12 September 1986 terhadap perkembangan neraca perdagangan luar negeri Indonesia periode 1987 sampai dengan 1991.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai Kebijakan Devaluasi Nilai Mata Uang Rupiah 12 September 1986: Pengaruhnya terhadap Neraca Perdagangan Luar Negeri Tahun 1987-1991, menggunakan beberapa buku sebagai tinjauan pustaka.

Buku *pertama*, adalah yang berjudul *Ekonomi Indonesia, masalah dan prospek 1986/1987*, yang diterbitkan oleh Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.³⁴ Buku tersebut berisi mengenai kondisi perekonomian Indonesia dalam periode 1985/1986 dan dalam periode 1986/1987. Kaitanya dengan gambaran prospek ekonomi di tahun 1986/1987 terutama dilihat dari segi neraca pembayaran, dan APBN. Pembahasan tentang kondisi perekonomian Indonesia terutama paska devaluasi nilai mata uang rupiah 12 September 1986, perlu melihat kondisi ekonomi Indonesia dalam periode 1985/1987 dan melihat prospek setelah kebijakan tersebut dilakukan, dengan cara membandingkan periode paska diadakannya kebijakan devaluasi nilai mata uang rupiah 12 September 1986.

Buku *kedua*, adalah *Masalah Pokok dan Prospek Perekonomian Indonesia 1987*, yang dikeluarkan oleh *Bank Indonesia, 1987*.³⁵ Buku itu, memberikan gambaran terperinci kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 1986. Terutama masa paska terjadinya bonanza minyak bumi akibat terjadinya kemerosotan harga minyak bumi terkait dengan adanya pembatasan kuota yang dilakukan OPEC

³⁴Moh. Arsjad Anwar, dkk, *Ekonomi Indonesia, masalah dan Prospek 1986/1987*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hlm. 1-277.

³⁵*Masalah Pokok dan Prospek Perekonomian Indonesia 1987*, (1987), hlm 1-119.

sejak tahun 1982.³⁶ Buku itu memberikan sebuah gambaran mengenai perkembangan perekonomian Indonesia pada tahun 1986. Dalam hal ini, pada tahun tersebut merupakan masa paling sulit yang dihadapi Pemerintah Indonesia, yang ditandai adanya tekanan-tekanan berat yang dihadapi neraca pembayaran dan rendahnya tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, guna memperkecil pengaruh negatif dari tekanan-tekanan yang dirasakan terhadap perekonomian Indonesia, pemerintah berusaha mengambil serangkaian kebijakan penyesuaian, sebagai kelanjutan dari berbagai kebijakan mendasar yang diambil pada tahun-tahun sebelumnya. Semua hal itu, diperlukan untuk memahami kondisi neraca pembayaran Indonesia secara keseluruhan akibat dari adanya kemerosotan tajam harga minyak bumi pada tahun 1986. Hal itu, sejalan dengan adanya perkembangan perekonomian dunia yang masih belum menggembirakan, sehingga menyebabkan semakin besarnya defisit yang terjadi pada transaksi berjalan. Dalam hal ini, terjadinya kemerosotan harga minyak bumi telah mengakibatkan penurunan yang sangat tajam dalam penerimaan pemerintah. Hal itu disebabkan karena penerimaan pemerintah masih sangat bergantung banyak pada sektor migas. Semua hal itu diperlukan untuk memahami serangkaian kebijakan yang diadakan pemerintah dalam tahun 1986, terutama yang terkait dengan hubungan antara kebijakan devaluasi 12 September 1986 dan perkembangan neraca perdagangan luar negeri Indonesia periode 1983 sampai dengan 1991.

Buku *ketiga*, adalah *Industrialisasi di Indonesia*, terjemahan Maria Pangestu, ditulis oleh Thee Kian Wie, yang diterbitkan oleh PT Pustaka LP3ES Indonesia.³⁷ Dalam buku itu, terdapat tiga bahasan utama yaitu industrialisasi secara umum, Penanaman Modal Asing (PMA) dan industrialisasi, dan proses pengembangan teknologi dan insutrialisasi. Buku itu, mampu memberikan

³⁶Bonanza minyak adalah keuntungan yang diperoleh dari naiknya harga minyak bumi.

³⁷THEE, Kian Wie, *Industrialisasi di Indonesia Berbagai kajian* terjemahan Maria Pangestu, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1996), hlm. 1-278.

gambaran kondisi ekonomi Indonesia sejak awal Orde Baru terkait adanya pembangunan ekonomi dan industrialisasi yang mengalami perkembangan pesat akibat terjadinya bonanza minyak bumi dari tahun 1973 sampai dengan 1981. Keadaan mulai kurang menguntungkan Indonesia memasuki tahun 1982 hal itu disebabkan terjadinya kemerosotan harga minyak bumi. Kondisi itu berlanjut hingga tahun 1986, sehingga terjadi perubahan arah kebijakan industrialisasi yang menggaris bawahi peningkatan efisiensi, persaingan dan orientasi ekspor. Perubahan arah tersebut akan dicapai salah satunya dengan Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan devaluasi 12 September 1986.

Buku keempat, merupakan jurnal yang berjudul “Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar, Seri Kebanksentralan No. 12”, yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.³⁸ Jurnal itu ditulis oleh I. Simorangkir Tahun 2004, yang berisi mengenai pengertian nilai tukar, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar dan nilai tukar dan perekonomian. Secara luas keterkaitan jurnal tersebut terdapat pada kebijakan devaluasi yang merupakan kebijakan menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap nilai mata uang asing, dimana Pemerintah Indonesia mengadakan kebijakan tersebut pada tanggal 12 September 1986. Dalam hal ini, kebijakan devaluasi yang dikeluarkan pemerintah terkait nilai tukar sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Terjadinya perubahan nilai tukar akan mempengaruhi harga-harga barang-barang impor. Dalam hal ini, nilai tukar akan mengalami depresi, karena harga-harga barang impor menjadi lebih mahal dan pada lanjutannya akan meningkatkan inflasi dalam negeri. Secara langsung perubahan nilai tukar dapat melalui perubahan permintaan. Adanya kenaikan harga barang-barang impor karena depresiasi dapat mengakibatkan pengurangan permintaan barang-barang impor dan meningkatkan ekspor lanjutannya, terjadi peningkatan permintaan agregat. Selanjutnya, peningkatan permintaan agregat dalam negeri dapat mendorong peningkatan harga-harga barang dengan diimbangi supply yang memadai. Kondisi itu merupakan tujuan dari diadakannya kebijakan

³⁸Iskandar Simorangkir, *Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar, Seri Kebanksentralan, No.12*, (2004), hlm. 1-134. (Diunduh pada tanggal 20 Mei 2019).

devaluasi 12 September, pemerintah mengharapkan terjadinya peningkatan pada ekspor non-migas dan menekan nilai impor.

E. Kerangka Pemikiran

Skripsi ini membahas tentang Kebijakan Devaluasi Nilai Mata Uang Rupiah 12 September 1986: Pengaruhnya terhadap Neraca Perdagangan Luar Negeri Tahun 1987-1991. *Kebijakan* dapat diartikan sebagai suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan.³⁹ Setiap kebijakan yang dikeluarkan akan berpengaruh pada suatu sistem. Salah satunya jika kebijakan tersebut berkaitan dengan usaha menstabilkan perekonomian suatu negara. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia pada dasarnya telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan terutama dalam bidang ekonomi. Salah satu kebijakan yang akan dibahas didalam skripsi ini adalah kebijakan dalam bidang ekonomi yaitu devaluasi.

Devaluasi adalah kebijakan pemerintah menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing.⁴⁰ Kebijakan devaluasi mata uang rupiah 12 September 1986 merupakan salah satu kebijakan yang mempunyai pengaruh menyeluruh terhadap komoditi ekspor, karena pada umumnya kebijakan tersebut bertujuan untuk menaikkan nilai ekspor. Dalam hal ini, tujuan kebijakan devaluasi nilai mata uang rupiah 12 September 1986 adalah untuk mendorong ekspor non-migas dan mengurangi impor tahun. Kedua unsur tersebut merupakan bagian dalam neraca perdagangan luar negeri Indonesia.

³⁹Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 20.

⁴⁰Iskandar Simorangkir, *Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar, Seri Kebanksentralan, No.12*, (2004), hlm. 4. (Diunduh pada tanggal 20 Mei 2019).

Namun untuk mencapai tujuan tersebut kebijakan itu harus ditunjang oleh paket kebijakan lain, baik kebijakan dalam sektor produksi maupun moneter.⁴¹

Nilai Mata Uang atau dikenal dengan nilai tukar (kurs) adalah nilai atau harga mata uang sebuah negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang negara lain atau harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing.⁴² Dalam hal ini, uang sebagai alat pembayaran transaksi ekonomi yang digunakan suatu negara dalam kaitannya dengan perdagangan luar negeri. Oleh karena itu, setiap mata uang suatu negara memiliki nilainya tersendiri terhadap mata uang asing. Hal itu dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan mata uang negara tersebut yang berasal dari perkembangan ekspor, impor dan aliran modal dari dan ke luar negeri. Uang yang dibahas dalam skripsi ini adalah rupiah, yang merupakan mata uang resmi negara Indonesia.

Kebijakan devaluasi nilai mata uang rupiah 12 September 1986 merupakan salah satu bagian dari pendekatan teori perkembangan kurs mata uang yaitu, pendekatan dalam neraca pembayaran yang terdiri dari unsur ekspor dan impor.⁴³ Tujuan utama Pemerintah Indonesia pada tahun 1986 mengadakan kebijakan tersebut adalah untuk memperbaiki kondisi dalam neraca pembayaran, dengan jalan meningkatkan daya saing komoditi ekspor khususnya ekspor non-migas di pasar dunia tahun dan menekan nilai impor. Dalam hal ini, pemerintah mengharapkan terjadinya perubahan pada struktur ekonomi Indonesia. Sebelumnya, dalam masa bonanza minyak struktur ekonomi Indonesia

⁴¹*Himpunan Kebijakan Pemerintah tanggal 12 September 1986, 2 Oktober 1986, 25 Oktober 1986 dan 15 September 1987 di Bidang Moneter, Perpajakan, Penanaman Modal, dan Pengembangan serta Perlindungan Industri dalam Negeri 1986*, (1987), hlm. 80.

⁴²Iskandar Simorangkir, *Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar, Seri Kebanksentralan, No.12*, (2004), hlm. 4. (Diunduh pada tanggal 20 Mei 2019).

⁴³Miftachul Munir, *Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Kurs Dollar di Indonesia 1979-1984 Suatu Pendekatan Moneter*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 1. Tahun 1986), hlm. 2. (<https://journal.ugm.ac.id/jieb/article/view/36877>, diunduh pada tanggal 21 Mei 2019).

menunjukkan karakter ketergantungan pada sektor primer yaitu migas.⁴⁴ Oleh karena itu, pemerintah mengharapkan terjadinya perubahan, dengan pemerintah terus mendorong ekspor non-migas dan mengurangi impor tahun 1987-1991. Pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut kemudian mengeluarkan kebijakan tindak lanjut berupa, paket kebijakan 25 Oktober 1986 dan paket kebijakan 15 Januari 1987. Sebelumnya pemerintah telah berupaya meningkatkan ekspor non-migas dengan mengeluarkannya kebijakan devaluasi 30 Maret 1983, Inpres No.4 Tahun 1985, dan Kebijakan 6 Mei 1986.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk penyusunan skripsi ini adalah metode sejarah, yaitu proses menguji dan menganalisis rekaman dan peninggalan masa lalu.⁴⁵ Dalam hal ini, metode sejarah mencakup empat langkah, yaitu heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi, dan Hitoriografi.⁴⁶

Dalam skripsi yang berjudul “Kebijakan Devaluasi Nilai Mata Uang Rupiah 12 September 1986: Pengaruhnya terhadap Neraca Perdagangan Luar Negeri Tahun 1987-1991”. Sumber yang digunakan untuk menulisnya dikategorikan dua macam, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer tertulis berupa laporan resmi dari lembaga pemerintah. Jenis sumber itu antara lain adalah; Laporan Tahunan Bank Indonesia, laporan Badan Biro Statistik (BPS) dan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Selain itu sumber dari surat kabar dan majalah seperti dari: surat kabar seperti Kompas, Suara Merdeka, Suara Karya, Pikiran Rakyat, Sinar Harapan, Harian Neraca Bank Indonesia, dan Induk Karangan (Business Neews). Sumber-sumber itu didapatkan dari dari perpustakaan Bank Indonesia yang berada di Jln. Imam

⁴⁴Bonanza minyak adalah sumber keuntungan yang diperoleh dari naiknya harga minyak bumi.

⁴⁵Louis Gottschalk, “*Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto” (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1983), hlm. 32.

⁴⁶Nugroho Notosusanto, *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah*. (Jakarta: Mega Bokk Store, 1984), hlm. 22-23.

Bardjo. S.H No. 4 Semarang, Pusat Informasi Kompas Biro Jawa Tengah yang berada di Jl. Menteri Supeno 30 Semarang, perpustakaan jurusan Sejarah yang berada di Jl. Prof. Soedarto, perpustakaan Universitas Diponegoro yang berada di komplek Gedung Widia Puraya, Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Kota Semarang.

Jenis sumber berikutnya adalah sumber sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap buku-buku karya sejarawan dan ahli yang relevan serta jurnal yang terkait di media online seperti, jurnal ekonomi dan bisnis yang ditulis oleh M. Munir Tahun 1986 mengenai “Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Kurs Dollar di Indonesia 1979-1984 Suatu Pendekatan Moneter”, yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan dan jurnal yang ditulis oleh I. Simorangkir Tahun 2004 mengenai “Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar, Seri Kebanksentralan No. 12”. Semua sumber-sumber itu berguna dalam melengkapi sumber-sumber primer yang telah didapatkan.

Setelah pengumpulan sumber (heuristik) dipandang cukup, tahap kedua adalah dilakukan pengujian sumber melalui kritik sumber yaitu, kritik eksteren dan kritik interen.⁴⁷ Penulisan ini menggunakan kritik interen, yang berguna untuk menentukan kredibilitas suatu sumber. Kritik intern dilakukan dengan cara mencermati isi dari sumber yang didapatkan peneliti. Kritik ini berhubungan dengan isi atau informasi yang terkandung dalam sebuah sumber yang telah dipastikan orisinalitasnya. Hasil dari kritik sumber adalah fakta sejarah. Dalam hal ini, ditemukan beberapa fakta tentang devaluasi mata uang rupiah tanggal 12 September 1986. Pertama, devaluasi dilakukan karena jatuhnya harga minyak bumi sejak tahun 1982. Kedua, devaluasi rupiah 12 September 1986 dilakukan untuk memperbaiki neraca pembayaran luar negeri Indonesia. Ketiga, setelah devaluasi 12 September 1986 pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendukung devaluasi tersebut. Kebijakan itu adalah; peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 45 tahun 1986 tentang penyesuaian harga atau nilai perolehan harta berkenaan dengan perubahan nilai tukar, keputusan menteri

⁴⁷Louis Gottschalk, “*Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto”, (1983), hlm. 80-117.

keuangan R.I Nomor 914/KMK.04/1986 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1986 tentang penyesuaian harga atau nilai perolehan harta berkenaan dengan perubahan nilai tukar rupiah, keterangan pers Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS dan sekaligus selaku Menteri keuangan ada interim Prof. DR.J.B. Sumarlin tentang deposito berjangka pada perbankan, surat edaran direktur Jendral Pajak Nomor: SE-43/Pj.21/1986 tentang perhitungan penghasilan kena pajak atas selisih nilai tukar sebagai akibat kebijakan Pemerintah di bidang moneter tanggal 12 September 1986, surat edaran Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS, Nomor: SE-70/A/1986:3259/D.VI/X/1986 tentang pedoman umum penyesuaian kontrak pekerjaan silpil borongan dan pekerjaan borongan lainnya, Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 828/KMK.04/1986 tentang pelaksanaan pemberian surat keterangan fiskal luar negeri, dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 830/kmk.04/1986 tentang pembebasan dari pemilikan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN) bagi warga negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap di luar wilayah Republik Indonesia.

Tahap ketiga interpretasi, merupakan kegiatan melakukan sintesis terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari tahap kritik sumber. Interpretasi adalah kegiatan penafsiran fakta-fakta dan data-data yang telah tersedia. Fakta-fakta sejarah yang relevan dengan “Kebijakan Devaluasi Nilai Mata Uang Rupiah 12 September 1986: Pengaruhnya Terhadap Neraca Perdagangan Luar Negeri Tahun 1983-1991” disintensiskan melalui imajinasi, interpretasi, dan teorisasi untuk menghubungkan kronologis dan kausalitas. Dengan demikian peristiwa kebijakan pemerintah itu dapat dijelaskan dan dipahami secara utuh. Dalam tahap ini, penggunaan konsep-konsep dan teori-teori ilmu ekonomi khususnya ekonomi makro berguna untuk membantu menjelaskan hubungan antara fakta, yaitu bagaimana hubungan antara kebijakan devaluasi nilai mata uang rupiah 12 September 1986 dan perkembangan neraca perdagangan luar negeri Indonesia periode 1987 sampai dengan 1991.

Tahap *Keempat*, historiografi merupakan tahap terakhir dari metode penelitian sejarah merupakan tahap merangkai fakta yang didapatkan dalam interpretasi secara kronologis/diakronis dan sistematis, menjadi tulisan sejarah dari peristiwa devaluasi 12 September 1986. Pada bagian ini, dipaparkan hasil penelitian dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar mudah dipahami dan dibaca. Sebuah karya sejarah tidak dapat terlepas dari subjektivitas sejarawan, sehingga karya sejarah satu dengan karya sejarah yang lain seringkali berbeda meskipun menggunakan satu sumber yang sama. Meski tidak dapat dihindarkan dalam penulisannya terdapat unsur subjektivitas, tetapi subjektivitas dapat diminimalkan. Pada tahapan ini, penulis berusaha agar meminimalkan subjektivitas dalam sekripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi tiga empat bab pembahasan,

Bab I Pendahuluan, bab pendahuluan ini terdiri dari, pertama latar belakang dan rumusan masalah. Kedua ruang lingkup, *ketiga* tujuan penelitian yang berisi mengenai tujuan penulisan dalam membuat penelitian terkait. *Keempat* tinjauan pustaka, *kelima* kerangka pemikiran, *keenam* metode penelitian, dan *ketujuh* sistematika penulisan yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian dalam sekripsi ini.

Bab II, membahas tentang ekonomi Indonesia menjelang tahun 1986. Dalam bab ini terdiri dari empat sub bab yaitu, keadaan ekonomi Indonesia sebelum dasawarsa 1986, kondisi neraca pembayaran Indonesia kaitannya dengan ekspor dan Impor, neraca perdagangan luar negeri Indonesia dan sumber devisa Pemerintah Indonesia sebelum tahun 1986.

Bab III, membahas tentang devaluasi nilai mata uang rupiah 12 September 1986. Bagian ketiga ini terdiri dari tiga sub bab yaitu, tujuan kebijakan devaluasi nilai mata uang rupiah 12 September 1986, kebijakan devaluasi nilai mata uang rupiah 12 September 1986, dan paket tindak lanjutan kebijakan devaluasi nilai mata uang rupiah 12 September 1986 berkaitan dengan upaya pemerintah mendorong peningkatan penerimaan ekspor non-migas

BAB IV, membahas mengenai pengaruh kebijakan devaluasi nilai mata uang rupiah 12 September 1986 terhadap neraca perdagangan luar negeri tahun 1987-1991. Bagian ini terdiri dari dua sub bab yaitu, membahas mengenai neraca pembayaran Indonesia kaitannya dengan ekspor dan impor setelah di keluarkannya paket tindak lanjutan devaluasi nilai mata uang rupiah 12 September 1986 dan pengaruh kebijakan devaluasi nilai mata uang rupiah terhadap neraca perdagangan luar negeri tahun 1987-1991.

BAB V, merupakan kesimpulan yang menjawab semua permasalahan yang diteliti.